

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung. Jakarta.
- Black dan Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary, Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, Wet Publishing Co. Minnesota.
- Fuady, Munir, 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Kansil, C.S.T dan Christine, S.T Kansil, 2011, , *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Kansil, C.S.T. et al., 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Nadapdap, Binoto, 2021, *Hukum Persaingan Usaha Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Versus Tembok Kartel*, Edisi Revisi, Jala Permata Aksara. Jakarta.
- Nugroho, Susanti A, 2018, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group. Jakarta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & R dan D*, Alfabeta. Bandung.
- Suhasril dan M. Taufik Makarao, 2003, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sirait, Ningrum N, 2003, *Asosiasi dan Persaingan Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Press. Medan.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya. Bandung.

Usman, Rachmadi, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, CV Sinar Grafika. Banjarmasin.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

H.I.R (Herzien Indlandsh Reglement)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

India Competition Act 2002

Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act 2004 (Public Law 108-237, Sec. 213 (b)).

Peraturan Komisi Pengawas Persainan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Safira Wulanda, 2022

KONSEP LENIENCY PROGRAMME DALAM SUATU KARTEL (ANALISIS PERATURAN KARTEL DI INDONESIA DAN INDIA)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi S1 – Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Peraturan Komisi Pengawas Persainan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Karya Ilmiah

Artha, I Gede, 2018, *Analisis Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal Terhadap Kasus Kartel di Indonesia*, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 , No. 7, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53871>

Gopalakrishnan, Aditi, et al. 2021, *Cartel Leniency in India: Overview*, Thomson Reuters: Westlaw

Hidayat, Rifqy, 2013, *Leniency Program Sebagai Upaya Minimalisasi Praktek Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, Malang.

M, Primandhika dan Artha, 2018, *Analisis Penepapan Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal Terhadap kasus Kartel di Indonesia*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 7

Monica, D, et al., 2018, *Reformulasi Pengaturan Leniency Program dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Perbandingan Leniency Program di Brazil)*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 9 No. 2, doi: <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2725>

Mubayyinah, Fira, 2017, *Perlindungan Sistem Hukum Pembuktian dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Tindak Pidana Lainnya*, Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman, Vol. 7, No. 1 <https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i1.3082>

Nindriani, Anita dan Pujiyono, 2020, *Prospek Leniency Program Sebagai Upaya Mengungkap Praktik Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jurnal Privat Law 8, No. 1 <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40359>

Prayogo, R. Tony, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2.

Safira Wulanda, 2022

KONSEP LENIENCY PROGRAMME DALAM SUATU KARTEL (ANALISIS PERATURAN KARTEL DI INDONESIA DAN INDIA)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi S1 – Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- Rachman, Miftahur, 2017, *Leniency Program sebagai Upaya Memberantas Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Business Law Review Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 3
- Silalahi, Udin & Isabella, 2017, Pembuktian Perkara Kartel di Indonesia dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence), *Jurnal Yudisial*, Vol. 10 No. 3 <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i3.216>
- Siregar, Mahmud, 2018, *Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13, No. 2, hlm. 192 <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.910>
- W, Yuniar Hayu, 2020, *Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia*, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 4, Vol. 5

Sumber Lainnya

- Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Persaingan Usaha, Jakarta, 2017
- Fikri Faqih, *Indonesia Peringkat 3 Negara Terkorup di Asia, Perlu Perampasan Kekayaan Koruptor*, Merdeka.com, 30 November 2020
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20190227/16/894074/antara-kppu-asosiasi-dan-persaingan-bisnis-yang-sehat>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 14:06 WIB.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb7bff86349a/perbedaan-iwhistle-blower-i-dan-ijustice-collaborator-i>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 14.08 WIB.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c68031569026/kppu-tawarkan-insentif-untuk-pembongkar-kartel/> diakses pada 7 Januari 2022 pukul 12:54
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/amnesti> diakses pada tanggal 2 Desember 2021 pukul 15:00 WIB.

Safira Wulanda, 2022

KONSEP LENIENCY PROGRAMME DALAM SUATU KARTEL (ANALISIS PERATURAN KARTEL DI INDONESIA DAN INDIA)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi S1 – Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- Keith Hankins & Peter Vanderschraaf, 2021, *Game Theori and Ethics*, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford University.
- Kodrat Wibowo, 2020, *Tantangan Pembuktian Ekonomi Dalam Kasus Kartel*, PPT Webinar, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Pedoman Pasal 11 Tentang Kartel*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 201.
- Nial E. Lynch, 2011, *United States Antitrust Law, Policies & Procedures*, Latham & Watkins, LLP.
- Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 17/KPPU I/2010.
- Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2021, *Pedoman Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, Jakarta.
- United Nations Conference on Trade and Development in Collaboration with The Ministry for Foreign Affairs of Sweden, 2016, UNCTAD MENA Programme: Competition Guidelines: Leniency Pogrammes, United Nations Conference on Trade and Development.
- United Nations Conference on Trade and Development, 2010, *The Use of Leniency Programmes as A Tool for The Enforcement of Competition Law Against Hardcore Cartels in Developing Countries*, United Nations Conference on Trade and Development.
- Wawancara dengan Ima Damayanti, *Kepala Biro Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, pada tanggal 24 Agustus 2021.